

## Peer Review :

# Pelabelan Radikalisme Bagi Kelompok Keagamaan Dalam Islam (Studi Relasi Agama dan Negara di Indonesia)

Lainnya 16 November 2012 [Tinggalkan komentar](#)

### **Pelabelan Radikalisme Bagi Kelompok Keagamaan Dalam Islam**

*(Studi Relasi Agama dan Negara di Indonesia)*

*Oleh: Fahmi Sallatalohy*

#### **Pendahuluan**

Runtuhnya kekuasaan otoriter Orde Baru memunculkan gerakan-gerakan sosial, politik dan keagamaan baru. Begitu kran kebebasan terbuka, muncul banyak organisasi sebagai wadah bagi penyuaran aspirasi. Munculnya gerakan secara massif itu dimungkinkan karena adanya respon sosial politik yang tertunda (*delayed responses*) terhadap sistem otoriter Orde Baru.[1] Tidak mengherankan jika muncul gerakan-gerakan sosial politik yang bertolak belakang dengan gerakan-gerakan mono ideologi yang terjadi pada masa Orde Baru. Dalam era reformasi Indonesia juga diwarnai adanya kelompok-kelompok keagamaan yang mengusung simbol-simbol militansi agama yang kental. Karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka kelompok-kelompok keagamaan baru banyak didominasi oleh kelompok Islam.[2]

Kelompok-kelompok keagamaan yang muncul tersebut, secara diametral mampu menciptakan sebuah sistem untuk meregulasi kepentingan mereka di luar kepentingan bersama suatu komunitas masyarakat. Dengan sistem sebagaimana mereka yakini berupa pemahaman literer dan eksklusif hal ini sebagaimana dijelaskan oleh El Fadl bahwa mereka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara tertutup.[3] El Fadl dengan tepat menggambarkan keterkaitan ideologis antara Wahabisme kontemporer, organisasi Jihad, dan kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden sambil mengeksplorasi perjuangan gerakan Islam puritan yang meneguhkan bentuk Islam paling murni dan paling autentik. Hubungan segi tiga ini menurut El Fadl, menunjukkan dinamika penting antara kelompok politik keagamaan yang bertujuan mempengaruhi dan menyusun kembali perpolitikan, kebiasaan sosial, identitas, dan praktik-praktik keagamaan umat Islam.[4]

Secara nasional, istilah radikalisasi dikenal bersamaan dengan muncul konflik antara agama maupun etnis yang terjadi di Indonesia, walaupun pada intinya partai-partai politik tertentu juga sudah melandasi kepentingan politiknya dengan mengedepankan hubungan antara sesama kelompok politik yang seiman dan seaqidah. Dengan demikian belum ada suatu penafsiran yang komplit terhadap penamaan istilah radikal bagi kelompok-kelompok keagamaan dalam Islam tersebut. Pemahaman terhadap radikalisasi itu sendiri jika dilacak memang tidak berhubungan langsung dengan organisasi-organisasi Islam yang konsern

dengan penegakan syariat Islam. Kelompok-kelompok yang disebut radikal tersebut sebenarnya lebih mengasosiasikan pemikiran dan tindakan mereka terhadap pemurnian ajaran Islam.

Pencitraan terhadap kelompok radikal dalam Islam memang tidak terlepas dari berbagai aktifitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut, misalnya saja Gerakan Front Pembela Islam, Laskar Jihad, Majelis Mujahidin Indonesia dan masih banyak lagi gerakan-gerakan serupa yang memiliki basis yang kuat di masyarakat. Kemunculan mereka disamping sebagai wujud dari respon psikologis yang tertunda terhadap kekuasaan yang otoriter, sesungguhnya adalah fenomena yang biasa ketika pintu keterbukaan di buka. Gerakan yang disebut Islam garis keras hanyalah satu dari banyaknya gerakan yang muncul pada masa reformasi.[5] Sebagaimana yang kita saksikan bahwa intensitas gerakan-gerakan ini sesuai dengan apa yang mereka apresiasikan yaitu menjadikan sebuah cita-cita perjuangan berdasarkan idealitas Islami.

Dalam konteks keagamaan, kelompok ini diberikan label bermacam-macam, ada yang menyebutnya dengan kelompok ekstrimisme, kelompok militan, radikal dan fundamentalis. Akan tetapi terdapat pengakuan yang umum bahwa terdapat fenomena-fenomena yang ditunjukkan untuk penyebutan gerakan keagamaan semacam itu. Walaupun tentunya saja harus diberi catatan bahwa penyebutan karakteristik gerakan keagamaan semacam itu haruslah diartikan sebagai titik berangkat untuk mencari informasi yang lebih mendalam, dan bukan dimaknai sebagai kesimpulan akhir. Dengan demikian terbuka kemungkinan untuk mempertanyakan kembali karakteristik-karakteristik yang dipakai sekarang ini.[6] Dengan demikian, menurut hemat saya pelabelan istilah radikalisme terhadap kelompok keagamaan Islam justru tidak tepat, karena apa yang mereka presentasikan selama ini merupakan aktifitas keagamaan yang mengarah pada pembentukan karakter Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah.

Oleh karena itu perlu dipahami bahwa karakter fundamentalisme adalah kepercayaan yang kuat bukan saja benarnya ajaran agama yang ada, tetapi juga atas keunggulan dari ajaran atau sistem yang disodorkan kepada manusia, para pendukung fundamentalisme cenderung bersikap keras dan militan. Kepercayaan yang berlebihan, bahkan dengan merasa yang paling benar yang biasa dipunyai kalangan fundamentalis bisa mendorong mereka kepada kekerasan. Jadi, meskipun hanya sebagian kecil saja yang melakukannya gerakan-gerakan fundamentalisme Islam ini cenderung melakukan kekerasan. Padahal cukup menarik untuk melihat bahwa lepas dari karakternya yang radikal beberapa kelompok fundamentalis itu telah melakukan cara-cara yang lebih terbuka dalam melaksanakan program-programnya. Hizbullah misalnya, lebih banyak melakukan dakwah melalui penerbitan yang bisa diakses oleh siapa saja, bahkan beberapa tokoh mereka mengancam dengan tegas kekerasan yang dilakukan sebagian orang yang mengatasnamakan Islam.[7]

Jadi sebenarnya, sangat tidak masuk akal kalau setiap kelompok keagamaan dalam Islam diberi label radikal tanpa lebih dahulu mengetahui dengan benar prinsip dan ideologi yang bangun oleh kelompok-kelompok tersebut. Hal ini sebagaimana yang menjadi pegangan pihak salafi, yang ditulis [Bernard Haykel](#), dalam *Radical Salafism: Osama's ideology*.

According to the [Salafis](#), Muslims can only be certain that they are not practising reprehensible innovations if they adhere to a strictly literal interpretation of the sources of revelation, and those are the Qur'an and the *Sunna* (the *Sunna* is the practice of Prophet Mohammad and can be found exclusively in the canonical collections of accounts of his

sayings and doings (*hadith*). Salafis claim to be the only Muslims capable of providing this literal interpretation; all other Muslims would therefore be- to a lesser or greater extent- deviant innovators.[8]

Tampak jelas bahwa sebenarnya tidak ada masalah yang berarti dengan Salafiyah ini, karena pada dasarnya setiap muslim akan mengakui legalitas kedudukan para sahabat Nabi Saw dan dua generasi terbaik umat Islam sesudahnya itu; *tabi'in* dan *atba' al-tabi'in*. Atau dengan kata lain, seorang muslim manapun sebenarnya memiliki kadar kesalafian dalam dirinya meskipun ia tidak pernah menggembar-gemborkan pengakuan bahwa ia seorang Salafi. Sebagaimana juga pengakuan kesalafian seseorang juga tidak pernah dapat menjadi jaminan bahwa ia benar-benar mengikuti jejak para al-Salaf al-Shalih.[9]

Berdasarkan kutipan tersebut, tampak bahwa kelompok-kelompok keagamaan Islam lebih menyadari bahwa energi perjuangan mereka tetap bertumpuh pada cita-cita Qur'an dan sunnah, dan mereka secara total ingin mengaplikasikan kehidupan mereka berdasarkan aturan-aturan yang Islami. Dalam konteks ini, organisasi keagamaan Islam semakin beranekaragam, dan kini, di era modern ini, mata sejarah semakin "dimanjakan" oleh kenyataan itu dengan tumbuhnya aneka gerakan Islam modern yang masing-masing menyimpan keunikannya tersendiri.[10]

Keunikan kelompok keagamaan Islam ini sejatinya tidak dapat dipandang berhubungan langsung dengan kekerasan dan apalagi masalah terorisme. Karena bagaimanapun mereka menyadari bahwa Islam adalah agama damai yang perlu diaksentuasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, gerakan-gerakan fundamentalisme Islam yang berbau politik sangat dipengaruhi oleh situasi kolonial yang dianggap telah mengebiri Islam dan menjatuhkannya ke pinggir.[11] Di Indonesia, gerakan-gerakan fundamentalisme Islam sering dikaitkan dengan kelompok-kelompok yang ingin melakukan formalisasi Islam melalui politik. Masalah yang mereka perjuangkan tidak saja ditujukan untuk menerapkan syariat Islam tetapi juga mengaitkan Islam dengan kekuasaan. Kecenderungan seperti ini bisa dilihat dari yang dilakukan oleh HTI, MMI, dan DI. Lebih dari itu, ada juga gerakan-gerakan fundamentalisme Islam bahkan menggunakan partai politik sebagai media perjuangannya, Partai Keadilan [Sejahtera] adalah salah satu contoh, tetapi mungkin juga satu-satunya.[12]

Dengan demikian, kemunculan kelompok-kelompok keagamaan dalam Islam sesungguhnya merupakan realitas yang memiliki cakupan sangat luas, yaitu realitas sosiologis dan politik. Secara sosiologis, mereka ingin mengembangkan ajaran Islam ke semua lapisan masyarakat, dan secara politik mereka dapat menempatkan diri dalam konteks yang lebih luas yaitu sistem perpolitikan nasional. Menurut Taufik Abdullah, bahwa dari kecenderungan sosiologis ini antara lain bisa dilihat perdebatan ideologis antara mereka yang pernah di sebut nasionalis dan Islam. Kalau yang pertama, mencoba secara ekstrim membedakan dua konsep komunitas dari manapun idea atau bahkan ideologi tambahan diambil, maka yang kedua dengan tidak kurang ekstrimnya, melebur keduanya dalam konsep ummat (yang nasional).[13]

Menurut Vedi R Hadiz, yang dikutip A.R.Mardhatillah Umar bahwa ada stereotype mengenai gerakan keagamaan yang "fundamentalis". Stereotype ini kian meluas tidak hanya pada aksi terorisme, tetapi juga pada aspek-aspek lain yang tidak ada kaitannya dengan aksi teror. Di beberapa tempat, orang-orang yang memiliki identitas keislaman yang kuat justru dicurigai sebagai "teroris" atau "fundamentalis" yang dianggap berbahaya.[14]

Pada titik ini, Vedi R Hadiz memberikan analisis kunci terhadap kemunculan gerakan-gerakan yang dinilai radikal. Orde Baru, dengan perangkat-perangkat birokrasi, baik dalam jenis militer maupun sipil, mentransformasikan diri menjadi rejim otoritarian dengan cara menindas kekuatan-kekuatan yang berpotensi menjadi oposisi. Komunisme dijadikan ideologi terlarang. Nasionalisme, sebagai kekuatan terkuat pasca-1955, dipersempit ruang gerakannya dengan membungkam hak politik tokoh-tokohnya. Sehingga, kekuatan yang tersisa tinggal satu: Islam, yang tak dapat dihabisi oleh rejim karena memiliki basis kultural yang sangat kuat. Untuk melakukan subordinasi terhadap kekuatan Islam, lahirlah diskursus mengenai Islam Radikal. Kasus pertama yang dicuatkan oleh rejim Orde Baru adalah Komando Jihad (pembajakan pesawat Woyla) yang disinyalir sebagai aksi terorisme pertama di Indonesia. Kemudian, lahirlah kasus-kasus lain yang sebenarnya tak bisa dilepaskan dari kepentingan politik Orde Baru.

Awal kemunculan gerakan politik Islam di Indonesia, yaitu Sarekat Islam (SI), misalnya, diawali oleh inisiatif pedagang-pedagang muslim untuk melindungi kepentingan dagang mereka dari ekspansi pedagang Cina. Mereka sadar bahwa untuk mengalahkan lawan bisnis harus dengan persatuan. Perkembangan berikutnya, Sarekat Islam pasca-Tjokroaminoto terfragmentasi menjadi SI-Merah yang akhirnya kita kenal sebagai Partai Komunis Indonesia. Dalam konteks negara pasca-kolonial, kekuatan politik umat Islam yang direpresentasikan oleh Masyumi, juga diwarnai oleh kepentingan-kepentingan material yang menjadi sebuah basis dalam perseteruan kelompok Islam dengan kelompok sekuler dalam perdebatan mengenai ideologi negara. Berpijak pada logika tersebut, maka sejarah umat Islam di Indonesia adalah sejarah pergolakan kepentingan-kepentingan material vis-à-vis mereka yang termarginalkan. Persoalannya adalah sebagaimana yang dipertanyakan Vedi R Hadiz, bahwa apa yang terjadi ketika rejim Orde Baru kemudian mengambil alih peran sebagai pemilik sumber daya dan secara represif melakukan subordinasi kepada kelompok-kelompok yang berpotensi menjadi oposisi terhadap sentralisme peran negara?<sup>[15]</sup>

Dalam konteks inilah sebenarnya, kita berupaya untuk menganalisis kembali perbedaan-perbedaan tingkat pelabelan pada gerakan kelompok keagamaan Islam yang secara gigih ingin mengembalikan wibawa gerakan keagamaan, dengan kelompok keagamaan Islam yang notabene mensyaratkan gerakan mereka melawan rejim dengan jalan kekerasan atau teror.

Berdasarkan penjelesan-penjelasan tersebut, maka masalah pokok yang perlu diajukan adalah apakah semua kelompok keagamaan Islam itu bersifat Radikal? Apa motif dibalik pelabelan radikalisme tersebut?

### **Radikalisme dalam Islam**

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan-pembahasan di awal makalah ini, bahwa kelompok-kelompok keagamaan dalam Islam yang dilabeli dengan istilah radikalisme memang tidak sedikit jumlahnya.

Yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang berpandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Sementara Islam merupakan agama kedamaian yang mengajarkan sikap berdamai dan mencari perdamaian. Islam tidak pernah membenarkan praktek penggunaan kekerasan dalam menyebarkan agama, faham keagamaan serta paham politik. Tetapi memang tidak bisa dibantah bahwa dalam perjalanan sejarahnya terdapat kelompok-kelompok Islam tertentu yang menggunakan jalan kekerasan untuk mencapai tujuan politis atau mempertahankan faham keagamaannya secara

kaku yang dalam bahasa peradaban global sering disebut kaum radikalisme Islam. Istilah radikalisme untuk menyebut kelompok garis keras dipandang lebih tepat ketimbang fundamentalisme karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang *interpretable*. Dalam tradisi pemikiran teologi keagamaan, fundamentalisme merupakan gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku dalam tatanan kehidupan umat Islam kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits. Sebutan fundamentalis memang terkadang bermaksud untuk menunjuk kelompok pengembali (revivalis) Islam. Tetapi terkadang istilah fundamentalis juga ditujukan untuk menyebut gerakan radikalisme.[16] Akan tetapi menurut hemat saya, harus dipahami benar bahwa tidak serta merta setiap kekerasan dan teror yang muncul memiliki *causa prima* dengan melabelkan seluruh kelompok keagamaan Islam bertindak secara radikal. Hal ini secara historis berhubungan langsung dengan kekuasaan yang menempatkan kelompok Islam sebagai kelompok marjinal.

Menurut Vedi R. Hadiz, begitu berkuasa, Orde Baru dengan cepat mengambil kebijakan yang keras terhadap organisasi Islam secara umum. Alasannya sangat jelas: dengan disingkirkannya komunis, Islam politik menjadi satu-satunya kekuatan di Indonesia yang memiliki potensi untuk memobilisasi diri. Munculnya kekuatan Islam yang terorganisir dengan basis akar rumput yang kuat, jelas menentang logika dasar Orde Baru yang memulai pembangunan kapitalis di atas basis stabilitas sosial yang muncul melalui politik demobilisasi masyarakat secara luas.[17]

Munculnya isu-isu politis mengenai radikalisme Islam merupakan tantangan baru bagi umat Islam untuk menjawabnya. Isu radikalisme Islam ini sebenarnya sudah lama mencuat di permukaan wacana internasional. Radikalisme Islam sebagai fenomena historis-sosiologis merupakan masalah yang banyak dibicarakan dalam wacana politik dan peradaban global akibat kekuatan media yang memiliki potensi besar dalam menciptakan persepsi masyarakat dunia. Banyak label-label yang diberikan oleh kalangan Eropa Barat dan Amerika Serikat untuk menyebut gerakan Islam radikal, dari sebutan kelompok garis keras, ekstrimis, militan, Islam kanan, fundamentalisme sampai terorisme. Bahkan di negara-negara Barat pasca hancurnya ideologi komunisme (pasca perang dingin) memandang Islam sebagai gerakan dari peradaban yang menakutkan.[18] Tidak ada gejala politik yang lebih ditakuti melebihi bangkitnya gerakan Islam yang diberinya label sebagai radikalisme Islam. Salah satu kutipan menarik dari El Fadl sebagai berikut:

*The extreme political violence we call terrorism is not a simple aberration unrelated to the political dynamics of a society. Generally, terrorism is the quintessential crime of those who feel powerless seeking to undermine the perceived power of a targeted group. Like many crimes of power, terrorism is also a hate crime, for it relies on a polarized rhetoric of belligerence toward a particular group that is demonized to the point of being denied any moral worth. To recruit and communicate effectively, this rhetoric of belligerence needs to tap into and exploit an already radicalized discourse with the expectation of resonating with the social and political frustrations of a people. If acts of terrorism find little resonance within a society, such acts and their ideological defenders are marginalized. But if these acts do find a degree of resonance, terrorism becomes incrementally more acute and severe, and its ideological justifications become progressively more radical.*[19]

El Fadl sebenarnya telah memberikan suatu analisis yang komplis tentang deferensiasi istilah terorisme yang mengarah pada masalah politik dan kontrol sosial. Bahwa apa yang dikenal dengan tindakan terorisme merupakan suatu aktifitas kekuasaan yang diwujudkan dalam tindakan-tindakan pengawasan, interogasi, dan atau pengalihan situasi agar seseorang atau

kelompok menjadi tertuduh. Dalam konteks ini, kelompok memiliki ruang yang besar untuk mendesain dan memotret secara kreatif aktivitas keagamaan. Oleh karena itu, sebenarnya radikalisme dalam Islam adalah pelabelan yang sejatinya lahir dari kekuasaan ini sendiri.

Menurut Bakri, ketergesa-gesaan dalam generalisasi dan yudisialisasi masalah tidak mampu memandang fenomena historis umat Islam secara obyektif. Tetapi hal ini tidak berarti pembenaran terhadap praktek radikalisme yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang demikian bertentangan dengan konsep-konsep moral yang terkandung dalam agama dan moralitas manusia. Akan tetapi, itu yang perlu diteliti adalah apakah Islam sebagai agama sangat menjunjung tinggi perdamaian. Hal ini adalah salah satu dalam perkembangan ilmu wahid dan sunnah tetapi dimanifestasikan dalam sejarah Islam awal, Islam *al-Aswaja* dan *al-Bihar* (era Nabi) sama sekali tidak pernah mengajarkan praktek radikalisme. Sebagaimana terminologi di Barat, Islam tidak memiliki keterkaitan dengan paham radikal, bahkan tidak ada pesan moral Islam yang menunjuk kepada ajaran radikalisme baik dari sisi keagamaan maupun historis kemudian. [20]

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa radikalisme Islam sebenarnya pelabelan yang "alah alama" terhadap semua kelompok keagamaan Islam. Akan tetapi, mengidentifikasi terhadap semua kelompok keagamaan Islam adalah radikal justru memunculkan *second opinion* siapa yang bermain di balik pelabelan tersebut. Karena secara substantif, Islam adalah agama damai yang dipahami berdasarkan prinsip-prinsip dalam ajaran al-Qur'an as-Sunnah. Saya kira, tidak ada satu orangpun dalam ruangan ini yang sepakat bahwa Islam identik dengan kekerasan, apa pun kita menuduh orang atau kelompok lain radikal fundamentalis padahal tidak ada inkonflik yang membubarkan hubungan tersebut.

#### Motif dibalik Pelabelan Radikalisme

Pada pertengahan 1980an, ketegangan antara Orde Baru dengan beberapa kelompok Muslim menjadi lebih terbuka. Di sini penting digambarkan sejumlah insiden kekerasan, termasuk pemboman Gedung Korobudur di Jawa Tengah dan dua cabang Bank Central Asia yang dimiliki oleh Hain Sioe Liong, pengusaha Cina berkecukupan yang berlatar belakang Soekarno. Kejadian dramatis lainnya terjadi di pemukiman kelas pekerja di perbatasan between Tanjung Priok, di Jakarta Utara. Di tempat ini, kaum muslim dalam jumlah yang tidak diketahui yang turun ke jalan melakukan protes menuntut penghapusan sebuah kontrak antara pemerintah dengan pasukan keamanan yang berada di tempat itu pada 12 Desember 1984. Di antara mereka yang tertanam dalam pembantaian itu, termasuk juga salah satu pemimpin kerakyatan di Amir Biki. Biki adalah aktivis mahasiswa yang pernah aktif dalam organisasi Soekarno, ia kemudian menjadi seorang pengusaha yang berurusan dengan perusahaan minyak nasional Pertamina. [21] Namun demikian, pada akhir 1970-an, ia pernah berurusan dengan apa yang dilihatnya sebagai perlakuan istimewa terhadap perusahaan perminyakan Cina. Dalam peristiwa ini, ia merupakan contoh tipikal dari berbagai kasus kekerasan yang mengancam keutuhan dari perubahan yang ada melalui aliansinya dengan militer. Hal ini menunjukkan bahwa harapan tersebut tinggalah harapan.

Di luar peristiwa berdarah itu, hubungan antara kelompok Islam dengan Negara yang semakin tegang, muncul dalam bentuk pendirian kelompok organisasi muslim terapan diadikannya Pancasila yang terdiri dari sekumpulan orang yang lahir menjadi ideologi negara atau azas tunggal di pertengahan 1980-an. Beberapa kelompok Muslim, beranggapan lantang menentang kebijakan ini. Melalui kebijakan ini, pada tanggal Pancasila, pemerintah bermaksud memperkecil kemungkinan terjadinya kelompok-kelompok

dalam masyarakat. Semua organisasi diharuskan menerima Pancasila sebagai landasan keberadaannya. Yang menolak harus menerima resiko dibubarkan oleh negara.

Perkembangan yang diuraikan di atas, mesti diletakkan dalam konteks proses perubahan ekonomi dan sosial yang lebih luas pada tahun 1970an dan 1980-an, saat terjadi perkembangan kapitalisme yang sangat signifikan, yang disertai dengan perubahan sosio-struktural yang berhubungan dengannya. Hal terakhir ini dicirikan oleh kemunculan kelas pemilik kapital domestik yang kuat, penambahan bertahap jumlah anggota kelas pekerja industrial baru yang umumnya ditemui di pusat-pusat manufaktur perkotaan berupah rendah, dan juga kelas menengah perkotaan dan profesional bergaji tinggi, yang semakin tampak dari gaya hidup mereka yang berorientasi konsumsi. Reaksi dalam masyarakat Indonesia menyangkut pertumbuhan luar biasa bisnis keturunan Cina, pada dasarnya menyatukan orientasi kelas dan orientasi yang bersifat etno-religius, karena peran yang dimiliki oleh bisnis etnis Cina sebagai penengah dalam struktur ekonomi kolonial. Sebagai contoh, asal-usul Sarekat Islam, berkaitan dengan persaingan antara borjuis kecil Muslim dengan bisnis Cina. Konglomerasi Cina, pada akhirnya secara umum diasosiasikan sebagai keberlanjutan situasi era kolonial, dimana konsentrasi kekayaan di tangan minoritas keturunan Cina merupakan hasil dari akomodasinya dengan negara. Pada saat yang sama, korupsi besar-besaran dan aktivitas pemburu rente yang dilakukan oleh elite birokrasi semakin menjadi-jadi dan mengundang kemarahan publik.<sup>[22]</sup>

Sebagian besar kelas bawah Indonesia yang berkembang, terjadi kekurangan sumber budaya dan ideologi yang koheren sebagai metode analisa dalam memahami berbagai perubahan drastis yang sedang terjadi dalam lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam ketiadaan gerakan Kiri, demikian pula alternatif sosial demokrasi ataupun liberal karena represi negara yang meluas, apa yang kemudian ditawarkan pada mereka adalah Islam. Satu-satunya saingan adalah nasionalisme sekular Soekarno, yang dilestarikan dalam bentuk yang lebih lunak oleh organisasi-organisasi penerus PNI zaman Soekarno (Partai Nasional Indonesia) yaitu PDI dan kemudian PDI-P. Meskipun demikian, para penerus ini gagal mengisi kekosongan yang ditinggalkan pasca kehancuran PKI, yang kemudian menjadi lebih besar lagi saat masyarakat Indonesia dan struktur kelasnya ditransformasikan di bawah pemerintahan Soeharto.

Karena itulah Sidel mengatakan, industrialisasi yang begitu deras di bawah Orde Baru, menciptakan sebuah 'kelas bawah pinggiran dan perkotaan' yang siap untuk dimobilisasi, tidak sebagai kelas proletar yang berkesadaran, namun sebagai anggota atau pengikut umat Islam<sup>[23]</sup> Mobilisasi ini tak diragukan lagi, difasilitasi oleh ekspansi besar-besaran di bidang kesejahteraan sosial dan kegiatan pendidikan yang sudah berlangsung sebelumnya, yang dilakukan oleh berbagai organisasi Islam melalui jaringan masjid dan asrama sekolah yang luas.

Ketegangan antara Islam politik dan negara kemudian hanya terhapus sebagian dengan dibentuknya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) pada tahun 1990. Dipimpin oleh salah satu pembantu kunci Soeharto, sang teknokrat- insinyur, BJ Habibie, kendaraan ini menyediakan tempat dalam birokrasi untuk para pengikut kelas menengah Muslim baru, yang diproduksi oleh proses modernisasi yang menyebabkan meningkatnya ambisi-ambisi mereka, yang terpenting, ICMI juga mengakomodasi banyak aktivis Muslim yang dulunya bersikap kritis.<sup>[24]</sup>

Latar belakang historis motif-motif pelabelan tersebut lebih bernuansa kekuasaan dan politik ketimbang sosial keagamaan. Tetapi setelah jatuhnya rezim Orde Baru, motif-motif pelabelan

... setiap kegiatan keagamaan...  
... adalah kelompok-kelompok...  
... keamanan-ekanan yang serasi...  
... yang seaman lama tertutup...  
... buah keputusan politik ken...  
... kebutuhan sosial ker...  
... hehrai saya, apa yang...  
... yang sangat sempurna...  
... yang sudah dipertahaka...  
... yang men berontak terha...

... Indonesia penanaman...  
... ana dengan ana yang...  
... Islam Indonesia yang...  
... gan, dinamik...  
... s-kasus kekerasan politik...  
... elasi yang lebih istinc...  
... gerakan-gerakan keagam...  
... an terlanjur dicurigai, ak...  
... sosial dilupakan.

... ahasan point ini, saya me...  
... slam, dia mengatakan ba...

... *worldview. Islamic close*  
... *social norms shared by the*  
... *relationships, interperso*

... dan R. Scoot Appleby...  
... (1991), h. 9, dalam Janha...  
... (Grafindo Persada), h. 13

... *of Tolerance in Islam*  
... *Perans Islam, Puritanis*

... *om, op.cit.*, h. 18



[7]Turmudi, *Fundamentalisme dan gerakan Islam Radikal di Indonesia*, disampaikan dalam Seminatr "Refleksi Akhir Tahun 2003" diadakan oleh Kedeputian IPSK LIPI, 22 Desember 2003, Jakarta.

[8]Haykel, *Radical Salafism: Osama's ideology*, dalam <http://muslim-canada.org/binladendawn.html>

download tanggal 18 agustus 2010

[9]Ikhsan, 2006, *Gerakan Salafi Modern di Indonesia, Sebuah Upaya Membedah Akar Pertumbuhan dan Ide-ide Substansialnya* <http://www.wahdah.or.id/wis>

[10]Ikhsan, *ibid.*

[11]*ibid.*

[12]*ibid.*

[13]Abdullah *Islam dan Masyarakat, Pantulan Sejarah Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, , 1987), h. 71

[14]Umar, *Ekonomi-Politik Wacana "Islam Radikal" vis-a-vis "Islam Moderat"* dalam <http://kammikomsatugm.wordpress.com/2010>

[15]*ibid.*

[16] Bakri, *Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer*, jurnal Dinika Vol. 3 No. 1. Januari 2004,

[17]Hadiz, *Menuju Suatu Pemahaman Sosiologis Terhadap Radikalisme Islam di Indonesia* i [http://indoprogress.blogspot.com/2008/05/menuju-suatu-pemahaman-sosiologis\\_07.html](http://indoprogress.blogspot.com/2008/05/menuju-suatu-pemahaman-sosiologis_07.html)

[18] Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*, (Jakarta:Paramadina, 1995), h. 270

[19]Fadl, El, "Islam and the Theology of Power, Supremacist puritanism in contemporary Islam is dismissive of all moral norms or ethical values." (Copyright © Middle East Report, 2001), h. 221, Winter.

[20] *ibid.*

[21]Raillon, 1994 "The New Order and Islam, or the Imbroglia of Faith and Politics", Indonesia, dalam Vedi R. Hadiz, *Menuju Suatu Pemahaman Sosiologis Terhadap Radikalisme Islam di Indonesia*, i

[http://indoprogress.blogspot.com/2008/05/menuju-suatu-pemahaman-sosiologis\\_07.html](http://indoprogress.blogspot.com/2008/05/menuju-suatu-pemahaman-sosiologis_07.html)

[22]Lubeck, "Islamist Responses to Globalization: Cultural Conflict in Egypt, Algeria, and Malaysia." In *The Myth of "Ethnic Conflict": Politics, Economics, and "Cultural" Violence*, edited by Beverly Crawford and Ronnie D. Lipschutz. (University of California

Press/University of California International and Area Studies Digital Collection, Edited Volume, 98, 1998), h. 293-319

[23]Sidel, *"Riots, Pogroms and Jihad: Religious Violence in Indonesia,"* (Ithaca: Cornell University Press, 2006),.

[24]Robison, and Hadiz, *"Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets,"* (London: Routledge 2004),